



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 31 Agustus 2021

Halaman: 1

DIY Belum Turun Level

JOGJA-Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 6 September. DIY masih belum turun level dan tetap berada di level 4.

Ujang Hasanudin & Jumali
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Wilayah aglomerasi yang masuk dalam PPKM level 3 adalah Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya.
- ▶ Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyatakan objek wisata belum akan dibuka dan pembelajaran tatap muka (PTM) juga belum akan dimulai.

Sejumlah aglomerasi di Pulau Jawa seperti Malang Raya dan Soloraya turun ke level 3. "Pemerintah memutuskan [perpanjangan PPKM] mulai 31 Agustus hingga 6 September," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (30/8) malam.

Jokowi mengatakan wilayah aglomerasi yang masuk dalam PPKM level 3 adalah Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya.

"Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2. Sehingga secara keseluruhan di Jawa-Bali ada perkembangan cukup baik," ucapnya. Jokowi mengatakan ada 25 kabupaten/kota di Jawa Bali yang masih menerapkan PPKM level 4. Namun, Jokowi belum menjelaskan detail wilayah mana saja yang masih menerapkan PPKM level 4.

Jokowi menyebut ada tren perbaikan situasi Covid-19 sepekan terakhir. *Positivity rate* membaik, sedangkan *bed occupancy rate* (BOR) sudah di angka rata-rata 27%.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan DIY dan Bali masih masuk PPKM level 4.

"Terdapat dua wilayah aglomerasi yang masih pada level 4 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali," kata Luhut.

Ia memprediksi kedua provinsi tersebut akan turun level PPKM dalam beberapa waktu dekat.



Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Kepala

Ttd

no. S.Sos. MM
23 199603 1 005

DIY Belum...

Sebab saat ini kasus Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan tren membaik. "Saya kira akan masuk pada level 3 bukan minggu depan, tapi dalam beberapa hari ke depan," ucapnya.

Objek Wisata

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyatakan objek wisata belum akan dibuka dan pembelajaran tatap muka (PTM) juga belum akan dimulai. Sebab, kasus Covid-19 di DIY masih fluktuatif.

"Kami enggak berani (membuka PTM). Kalau saya enggak berani," kata Sultan.

Sultan berujar Pemerintah Pusat memang tidak mensyaratkan vaksinasi untuk menggelar PTM. Namun bagi Sultan vaksinasi menjadi syarat baginya untuk menggelar PTM baik bagi guru maupun siswanya.

Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini khawatir pembelajaran tatap muka menimbulkan penularan Covid-19.

Tidak hanya PTM, Sultan juga belum berani membuka objek wisata karena objek wisata berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga tidak ada jaminan tidak menularkan Covid-19.

Ia berharap kasus Covid-19 melandai stabil sehingga bisa diperkirakan penularan Covid-19 selesai. Saat ini, Sultan meminta masyarakat bersabar terlebih dahulu. "Nanti [kalau kasus Covid-19 di DIY] sudah stabil, tidak fluktuatif bisa diprediksi, tapi kalau naik turun kita tak bisa memperkirakan apa yang terjadi," ujar Sultan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadamanta Baskara Aji, mengatakan saat ini Pemda DIY masih fokus menggencarkan vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunal atau *herd immunity*. Vaksinasi mulai menyasar ke desa-desa agar terjadi pemerataan sasaran vaksin.

Baskara Aji mengklaim proses

vaksinasi di DIY berjalan bagus, rata-rata per pekan mencapai 32.000 sasaran dan stok vaksin juga aman dan selalu mendapat kiriman ketika dibutuhkan.

Integrasi Aplikasi

Dinas Pariwisata Pemda DIY berencana mengintegrasikan dua aplikasi kunjungan ke destinasi wisata, yakni aplikasi *Peduli Lindungi* yang merupakan syarat dari Pemerintah Pusat dengan aplikasi *Visitingjogja* yang sudah dimiliki Pemda DIY.

Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo, mengatakan wisatawan yang sering ke Jogja maupun pengelola destinasi selama ini sudah familier dengan aplikasi *Visitingjogja*. Aplikasi tersebut merupakan portal informasi yang dikelola Dinas Pariwisata DIY sebagai media informasi mengenai destinasi wisata favorit, ragam budaya, *event*, serta berbagai ekonomi kreatif yang ada di DIY.

Selain itu, aplikasi *Visiting Jogja* juga menjadi sarana untuk memantau wisatawan dan kapasitas destinasi wisata. Aplikasi itu juga mengurangi kontak fisik antara wisatawan dan pengelola destinasi karena pemesanan tiket dan pembayaran bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi. Sementara *Peduli Lindungi* juga untuk mengetahui kondisi wisatawan apakah sudah menjalani vaksin atau belum.

Dispar sudah menjajaki komunikasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk mengintegrasikan aplikasi *Peduli Lindungi* dan *Visitingjogja*. Menurut dia, dengan integrasi aplikasi akan memudahkan bagi wisatawan maupun pengelola destinasi.

"Jadi bukan kemudian duanya [aplikasi] dibuka tapi hanya satu di dalamnya ada *Peduli Lindungi* supaya simpel.

Data *Peduli Lindungi* dijadikan dasar meng-approve *Visitingjogja*," ujar Singgih.

Nantinya, sambung Singgih, bisa saja wisatawan cukup memiliki aplikasi *Visitingjogja* yang di dalamnya juga terdapat aplikasi *Peduli Lindungi*.

Kartu Vaksin

Pemkab Bantul akan mewajibkan wisatawan menunjukkan kartu vaksin selain memakai aplikasi *Peduli Lindungi*.

"Jadi kami akan menggunakan banyak cara, bisa pakai kartu vaksin, juga bisa pakai aplikasi *Peduli Lindungi*. Ini untuk memastikan yang hadir itu orang-orang yang memiliki imunitas pascavaksinasi dan semoga yang didatangi itu aman," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

Sejumlah pelaku wisata di Bantul mengaku lebih memilih menggunakan kartu vaksin sebagai syarat wisatawan yang datang, daripada aplikasi *Peduli Lindungi*. Alasannya, keberadaan aplikasi tersebut merepotkan mereka. Selain itu, para pelaku wisata di Bantul ini menilai tidak semua wisatawan yang datang punya ponsel.

Ketua Koperasi Notowono yang mengelola sejumlah objek wisata di Kapanewon Dlingo, Purwo Harsono, mengatakan meski telah ada sosialisasi pemberlakuan aplikasi *Peduli Lindungi* sebagai syarat berwisata, akan tetapi, itu baru sebatas rencana. "Karena pembukaan objek wisata kan baru akan dilakukan setelah 80 persen penduduk DIY ter vaksin, ini sesuai dengan keinginan dari Gubernur DIY," katanya.

Menurut Ipung-panggilan akrab Purwo Harsono, pihaknya dipastikan akan kesulitan dengan penerapan aplikasi tersebut sebagai syarat berwisata. Sebab, jika ada wisatawan yang tidak menggunakan ponsel dan tidak mengunduh aplikasi *Peduli Lindungi* nantinya harus ditolak. "Padahal, kan mereka sudah jauh-jauh datang, apa ya kami tolak?," jelasnya. (JIB/Detik/Liputan6)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005